

Minahasa Utara, 30 Januari 2023

No. : 040 /ABK/DIR/01.2023

Kepada Yth,
Kepala
Otoritas Jasa Keuangan
Wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara
Jl. Diponegoro No. 51
Manado

Perihal: Laporan Penerapan Tata Kelola PT BPR Arya Bira Karsa 2022

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, bahwa BPR wajib menyampaikan Laporan penerapan tata kelola, maka dengan ini kami sampaikan Laporan tersebut periode Tahun 2022.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT BPR Arya Bira Karsa



Aswin S.W. Kotambunan
Direktur Utama



Ayeng V. Kaligis
Direktur

Cc : -Dewan Komisaris PT BPR Arya Bira Karsa
-File

Minahasa Utara, 30 Januari 2023

No. : 040 /ABK/DIR/01.2023

Kepada Yth,
Perbarindo Pusat dan Media BPR
Di
Tempat

Perihal: Laporan Penerapan Tata Kelola PT BPR Arya Bira Karsa 2022

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, bahwa BPR wajib menyampaikan Laporan penerapan tata kelola ke Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR dan Media atau majalah ekonomi, maka dengan ini kami sampaikan Laporan tersebut periode Tahun 2022.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT BPR Arya Bira Karsa



Aswin S.W. Kotambunan
Direktur Utama



Ayeng V. Kaligis
Direktur

Cc : -Dewan Komisaris PT BPR Arya Bira Karsa
-File

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Alamat : Jalan Raya Manado Bitung, Kolongan Tetempangan Kec. Kalawat
Minahasa Utara

Nomor Telepon : 04317008567

Penjelasan Umum : Tahun 2022 BPR Arya Bira Karsa semakin berkembang pesat sehingga mampu mencapai asset Rp. 149.236.133.875,-. BPR pun berekspansi produk layanan baru yakni Virtual Account Host to Host dengan Bank Mandiri, dimana dengan adanya layanan ini diharapkan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat dan stakeholders dalam bertransaksi dengan BPR Arya Bira Karsa. Untuk itu komitmen untuk mengimplementasikan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau Good Corporate Governance di seluruh kegiatan usaha dan jenjang organisasi BPR terus dilaksanakan dan dipelihara agar kelangsungan usaha yang sehat dan terus berkembang selalu selaras dengan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik yakni T A R I F, Keterbukaan (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Pertanggungjawaban (Responsibility), Independensi (Independency) dan Kewajaran (Fairness).

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Aswin Sonny Wemy Kotambunan	Direktur Utama	1. Menentukan Kebijakan umum dalam memimpin Bank untuk mencapai tujuan perusahaan, 2. Bertanggung jawab atas penyusunan garis-garis kebijaksanaan perusahaan di bidang administrasi keuangan, kepegawaian dan umum serta perkreditan dalam upaya membangkitkan tingkat kesehatan dan pertumbuhan bank, 3. Bertanggung jawab dan mengurus harta kekayaan perusahaan dan mengawasi serta mengelola hubungan ataupun transaksi usaha dan keuangan perusahaan, 4. Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja perusahaan setiap tahun, 5. Mengadakan perubahan-perubahan dalam struktur organisasi sesuai dengan perkembangan usaha bank, 6. Membuat keputusan dalam hal memberikan jumlah pinjaman kepada calon nasabah, 7. Menyelenggarakan rapat umum pemegang saham, sekaligus menyampaikan laporan pertanggung jawaban Direksi untuk tahun buku bersangkutan, 8. Menandatangani surat-surat berharga dan dokumen penting perusahaan baik sesuai dengan aturan yang ada, 9. Menandatangani surat keputusan direksi secara sendiri atau bersama-sama yang meliputi segala gaji, promosi, mutasi, dan pemberhentian karyawan, 10. Membina hubungan dengan para pejabat Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Perbarindo, Pemerintah Daerah, PPAK dan instansi lainnya, 11. Memberikan penghargaan kepada para karyawan yang telah menunjukan pengabdian dan kesetiaannya kepada bank, 12. Bertanggung jawab terhadap pencapaian rencana kerja dan anggaran yang telah disetujui oleh dewan komisaris, 13. Menandatangani laporan-laporan bank yang penting khususnya laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak-pihak extern lainnya, 14. Mengangkat dan memberhentikan karyawan atas usul dari para Kepala Bidang unit kerja/bagian personalia, 15. Mengendalikan dan mengawasi tugas pemberian persetujuan kredit, pengelolaan sdm, pengawas dan pendanaan bank.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
2	Ayeng Veibe Kaligis	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	1. Memonitor dan mengevaluasi laporan pengendalian biaya, perubahan dan perkembangan pendapatan bank secara periodic dan berkesinambungan, 2. Bertanggung jawab kepada semua kegiatan dalam tugas operasional bank/perusahaan dan membawa misi pengenalan dan misi perusahaan pada umum dengan melakukan fungsi humas serta kepatuhan, 3. Bertanggung jawab atas penyusunan laporan/program dan realisasinya pada setiap periode pertanggung jawaban anggaran, 4. Mewakili Direksi dalam hal Direktur Utama sedang berhalangan, 5. Mengkoordinasi dan mengarahkan semua kegiatan-kegiatan pada setiap bagian, 6. Melakukan pengawasan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dalam kantor, termasuk pada semua unit kerja, 7. Memeriksa dan mengawasi administrasi keuangan bank, 8. Meneliti kebenaran dan kelengkapan atas laporan keuangan, terutama neraca dan perhitungan rugi/laba perusahaan, 9. Mengadakan pengawasan serta penilaian terhadap efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tata kerja sesuai dengan ketentuan organisasi, 10. Menyelenggarakan dan mempersiapkan bahan-bahan laporan untuk rapat-rapat Direksi dan komisaris, 11. Meneliti kebenaran dan mengawasi semua pengeluaran biaya-biaya operasional, 12. Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja perusahaan sampai ke unit terbawah, 13. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Direktur Utama sepanjang masih dalam ruang lingkup tugas dan fungsinya sebagai Direktur Perusahaan, 14. Melaksanakan Tugas kepatuhan dan penerapan manajemen risiko dalam setiap aspek organisasi.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Dalam mengimplementasikan tugas dan tanggung jawabnya Direksi menindaklanjuti rekomendasi dari Dewan Komisaris.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Adapun rekomendasi Dewan Komisaris yang telah di tindak lanjuti Direksi yakni BPR melakukan prospect kredit dengan PT BPD Sulut Gorontalo dan Dosen-dosen Universitas Klbat Airmadidi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Billy Donald Kumolontang	Komisaris Utama	1) Sebagai pusat komunikasi antara Dewan Komisaris dan Direksi, serta pemegang saham, 2) Memastikan bahwa Dewan Komisaris senantiasa diberi informasi mengenai hal-hal yang relevan dan dimintakan persetujuan yang diperlukan, 3) Bertanggung jawab memimpin Dewan Komisaris guna menjamin efektifitas fungsi Dewan Komisaris, 4) Bertanggung jawab untuk menentukan agenda rapat dan memimpin rapat, 5) Komisaris Utama menentukan keadaan mendesak dalam hal undangan rapat Dewan Komisaris dilakukan dalam waktu kurang dari 3 hari, 6) Mengundang anggota Dewan Komisaris untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris, 7) Memastikan agar para Komisaris mendapatkan informasi yang akurat, tepat waktu dan jelas, 8) Membina hubungan yang konstruktif antara Dewan Komisaris dan Direksi, 9) Mengembangkan standar Corporate Governance yang terbaik.
2	Ronald Christian Welong	Komisaris	1) Melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi, dengan memberikan nasihat, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan strategic, termasuk persetujuan terhadap penyediaan dana kepada pihak-pihak yang terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit bank; 2) Memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. 3) Bersama-sama dengan Komisaris Utama mereview dan menyetujui rencana bisnis. 4) Bersama-sama dengan Komisaris Utama mereview dan menyetujui laporan tahunan. 5) Memberikan laporan dan mendapatkan persetujuan pemegang saham pada Laporan Pengawasan Dewan Komisaris. 6) Bersama-sama dengan Komisaris utama membuat dan melaporkan hasil pengawasan dan kinerja bank kepada Otoritas Jasa Keuangan. 7) Pengawasan aktif terhadap fungsi kepatuhan. 8) Menghadiri semua rapat Dewan Komisaris dan rapat Komite terkait; 9) Menghadiri semua rapat Pemegang Saham. 10) Memberikan masukan strategi serta meninjau kinerja dan efektifitas manajemen pada rapat yang menyetujui sasaran dan tujuan serta memantau Laporan Kinerja. 11) Mengikuti pendidikan yang terkait dan berkelanjutan serta dimutakhirkan terhadap perubahan aturan dan ketentuan perundangan serta standar yang relevan.

Rekomendasi Kepada Direksi

Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberi nasihat dan atau rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh Direksi.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rekomendasi Dewan Komisaris untuk meningkatkan penyaluran kredit dengan melakukan prospect atau kerjasama dengan PT BPD Sulut Gorontalo dan Dosen-dosen Universitas Klabat Airmadidi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Posisi modal inti BPR kurang dari 50.000.000.000,- sehingga BPR belum membentuk komite Audit, komite Pemantau Risiko dan komite Remunerasi. Fungsi audit intern, pemantau risiko dibawah oleh Pejabat Eksekutif.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Periode 2022 BPR memiliki modal inti < 50.000.000.000,- sehingga BPR mengangkat Pejabat Eksekutif yang membawahi fungsi audit inten, dan pemantau risiko. BPR belum membentuk komite Audit, komite Pemantau Risiko dan komite Remunerasi.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Periode 2022 BPR memiliki modal inti < 50.000.000.000,- sehingga BPR mengangkat Pejabat Eksekutif yang membawahi fungsi audit inten, dan pemantau risiko, belum membentuk komite Audit, komite Pemantau Risiko dan komite Remunerasi.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Direksi tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Masing-masing anggota Direksi tidak memiliki saham di BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Aswin Sonny Wemy Kotambunan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Ayeng Veibe Kaligis	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lain juga dengan anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Aswin Sonny Wemy Kotambunan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Ayeng Veibe Kaligis	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Masing-masing anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Billy Donald Kumolontang	1.907.850.000	38,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Komisaris Utama BPR juga merupakan Pemegang Saham Pengendali BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Billy Donald Kumolontang	Yayasan Kornelius Internasional	50,00
2	Billy Donald Kumolontang	Manado Independent School	50,00
3	Billy Donald Kumolontang	PT Cita Landasan Jaya	25,00
4	Billy Donald Kumolontang	PT Cita Laras Karsa	25,00
5	Billy Donald Kumolontang	PT Cita Lintas Kasih	25,00
6	Billy Donald Kumolontang	PT Anugerah Bayu Karsa	25,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Komisaris Utama BPR memiliki saham di perusahaan lain yang juga merupakan Group BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Billy Donald Kumolontang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Ronald Christian Welong	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris lain, Direksi dan Pemegang Saham

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Billy Donald Kumolontang	Tidak ada	Tidak ada	1. Fionne Lengkong - Istri, 2. Charlene Lynne Kumolontang - Anak, 3. Andri Bjorn Kumolontang - Anak
2	Ronald Christian Welong	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pemegang saham BPR merupakan keluarga inti dari Komisaris Utama.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	414000000	2	210000000
2	Tunjangan	2	41500000	2	12000000
3	Tantiem	2	0	2	0
4	Kompensasi berbasis saham	2	0	2	0
5	Remunerasi lainnya	2	145308536	2	58467200
	Total		600808536		280467200

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang diterima Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan dalam RUPS Tahun 2022.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Transportasi	Mobil Dinas	Mobil Dinas
3	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan	BPJS Kesehatan
4	Fasilitas lainnya	Tidak Ada	Tidak Ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang diterima Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan dalam RUPS Tahun 2022.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	1,42	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,19	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,25	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,00	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	3,19	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Manajemen BPR selalu berupaya menyejahterakan pegawai-pegawainya, hal ini nampak dari kenaikan upah dan tunjangan yang diterima pegawai BPR pada semester II Tahun 2022. Pemberian upah dan tunjangan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan mengevaluasi kinerja perusahaan serta pegawai BPR.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	06-01-2022	11	Rapat Kinerja & Rencana Bisnis BPR Tahun 2022
2	18-01-2022	12	Rapat Kinerja & Rencana Bisnis BPR Tahun 2022
3	05-02-2022	4	Rapat Bulanan Pengurus - Direksi dan Dewan Komisaris (Evaluasi Januari 2022)
4	09-03-2022	4	Rapat Bulanan Pengurus - Direksi dan Dewan Komisaris (Evaluasi Februari 2022)
5	12-04-2022	4	Rapat Bulanan Pengurus - Direksi dan Dewan Komisaris (Evaluasi Maret 2022)
6	24-06-2022	3	Rapat Direksi dan Dewan Komisaris
7	21-07-2022	4	Rapat Direksi dan Dewan Komisaris
8	06-09-2022	4	Rapat Direksi dan Dewan Komisaris
9	06-10-2022	4	Rapat Direksi dan Dewan Komisaris
10	09-11-2022	4	Rapat Direksi dan Dewan Komisaris
11	14-12-2022	4	Rapat Direksi dan Dewan Komisaris

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dewan Komisaris menyadari tugas dan tanggung-jawabnya sebagai dewan pengawas dan aktif melakukan rapat guna mengevaluasi perkembangan BPR.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Billy Donald Kumolontang	11	0	100,00
2	Ronald Christian Welong	11	0	100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya secara optimal dengan melakukan pengawasan dan mengevaluasi pencapaian target/ rencana bisnis serta perkembangan kinerja BPR melalui rapat yang dilaksanakan secara berkala dimana seluruh anggota Dewan Komisaris selalu hadir dalam pelaksanaan rapat tersebut.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak terdapat penyimpangan internal/fraud baik pada tahun laporan maupun tahun sebelumnya baik yang dilakukan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pegawai Tetap maupun Pegawai Tidak Tetap

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Selama periode 2022 tidak ada permasalahan hukum Perdata maupun Pidana yang dilaporkan dan dihadapi BPR.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak terdapat transaksi yang mengandung unsur benturan kepentingan di BPR selama periode 2022.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	20220427	Kegiatan Sosial	Sponsor Trophy untuk kegiatan perkemahan anak-anak dan remaja GMAHK Minut Bitung (tgl 1 s.d 5 Mei 2022 di UNKLAB)	GMAHK Minahasa Utara dan Bitung	1.305.000
2	20220509	Kegiatan Sosial	Sponsorship MIS SA Basketball Cup 2022	Panitia MIS SA Basketball Cup 2022 (Valerian The / Timothy Sutanto)	5.000.000
3	20220513	Kegiatan Sosial	Diakonia Sakit Orang Tua dari Ibu Ayeng V. Kaligis	Ayeng V. Kaligis	1.000.000
4	20220704	Kegiatan Sosial	Sampul untuk khadim Ibadah awal bulan Juli 2022	Pdt. Melky Tamaka, M.Th	1.000.000
5	20220815	Kegiatan Sosial	Sampul untuk Ibadah awal bulan Agustus 2022 dirangkaikan dengan syukur HUT BPR Arya Bira Karsa ke 2 tahun	Pdt. Ritus Keni	1.000.000
6	20220905	Kegiatan Sosial	Sampul untuk khadim Ibadah awal bulan September 2022	Pdt.	1.000.000
7	20220915	Kegiatan Sosial	Sponsor Trophy untuk kegiatan Retreat keluarga Pendeta GMAHK Minahasa	GMAHK Minahasa	1.485.000
8	20220919	Kegiatan Sosial	CSR BPR Arya dalam rangka HUT Bank Arya ke 2 Tahun	Panti dan Panti Lansia di Tomohon dan Tondano	8.223.250
9	20221005	Kegiatan Sosial	Sampul untuk khadim Ibadah awal bulan Oktober 2022	Pdt.	1.000.000
10	20221102	Kegiatan Sosial	Sampul untuk khadim Ibadah awal bulan November 2022	Pdt.	1.000.000
11	20221103	Kegiatan Sosial	Sumbangan ke GMIM Syalom Suluun Event Trail Adventure	GMIM Syalom Suluun	250.000
12	20221206	Kegiatan Sosial	Sampul untuk khadim Ibadah awal bulan Desember 2022	Pdt. Melky Tamaka	1.000.000
13	20221209	Kegiatan Sosial	Partisipasi untuk acara MIS Christmas	Manado Independent School	15.000.000
14	20221229	Kegiatan Sosial	Donasi ke Panti Asuhan Ranomuut dan Panti Werda Senja Cerah Kairagi dalam rangka Natal	Panti Asuhan Ranomuut dan Panti Werda Senja Cerah Kairagi	15.715.897
15	20221229	Kegiatan Sosial	Sampul untuk khadim Ibadah Natal BPR Arya di Panti Asuhan Dorkas Tondano	Pdt. Katrina Mongdong	1.000.000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Periode 2022 BPR semakin menyadari tanggung jawab sosialnya dan berupaya menunaikan tanggung jawab sosial tersebut dengan berjangkanya ke Panti Asuhan, Panti Werda serta turut berkontribusi untuk kegiatan-kegiatan sosial lainnya.

Nama BPR	: PT BPR Arya Bira Karsa
Posisi Laporan	: 31-12-2022
Alamat	: Jalan Raya Manado Bitung, Kolongan Tetempangan Kec. Kalawat Minahasa Utara
Nomor Telepon	: 04317008567
Modal Inti BPR	: 6.204.133.875,00
Total Aset BPR	: 149.236.643.257,00
Bobot BPR	: B
Status Audit Ekstern	: Diaudit
Nilai Komposit	: 1,1
Peringkat Komposit	: 1
Analisis	: Berdasarkan hasil analisis Self Assessment Tata Kelola, predikat komposit PT.BPR Arya Birsra Karsa secara umum adalah sangat baik. Hal ini ditunjukkan dalam pemenuhan yang baik atas 11 (sebelas) faktor penilaian dalam penerapan Tata Kelola, diantaranya: Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta proses penerapan tata kelola, Dewan Komisaris dan Direksi PT. BPR Arya Bira Karsa telah memenuhi ketentuan mengenai komposisi, jumlah integritas, domisili, kompetensi, independensi dan ketentuan rangkap jabatan. Pemenuhan terhadap struktur organisasi dengan dilakukannya pengangkatan Pejabat Eksekutif Operasional, Audit Intern, Manajemen Risiko dan Kepatuhan pada bulan Mei 2022 dan sudah dilaporkan ke OJK. Pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris dilakukan secara aktif dengan diadakannya rapat rutin setiap bulannya dengan mengevaluasi perkembangan BPR. Direksi pun telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS, memonitoring realisasi komitmen tindak lanjut temuan audit intern, KAP dan OJK. Penerapan Tata Kelola yang baik di BPR Arya Bira Karsa semakin tercermin dengan tidak adanya penyimpangan (fraud), transaksi yang mengandung unsur benturan kepentingan, tidak ada pengaduan/komplain nasabah serta kepatuhan dalam penyampaian laporan keuangan dan non keuangan juga laporan pengaduan nasabah dilaporkan secara tepat waktu. Meski terdapat kelemahan dalam penyaluran kredit kepada Pihak Terkait yang melebihi 10% dari modal BPR, namun pengikatan kredit tersebut diikat dengan jaminan likuid berupa tabungan dan bilyet giro yang mudah dicairkan, sehingga mengurangi risiko gagal bayar. Pemenuhan posisi PE Bisnis dalam struktur organisasi BPR pun sudah ada dalam rencana bisnis BPR periode 2023. Kedepannya PT. BPR Arya Bira Kars akan terus melakukan perbaikan terhadap beberapa kelemahan-kelemahan yang ada untuk penyempurnaan pelaksanaan Tata Kelola yang baik.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,59	0,40	0,10	1,09	0.218	Direksi menyadari tugas dan tanggungjawabnya dan menjalankannya sesuai pedoman dan aturan yang berlaku.
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,61	0,40	0,10	1,11	0.167	Dewan Komisaris berperan aktif dalam pengawasan terhadap tugas tanggung jawab direksi dan pertumbuhan BPR yang terbukti dari rapat yang diadakan secara berkala guna memonitor perkembangan dan pertumbuhan BPR.
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	Modal inti BPR < dari Rp. 80.000.000.000,- BPR belum membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	0,50	0,40	0,10	1,00	0.100	Tidak ada transaksi atau kegiatan yang mengandung unsur benturan kepentingan yang merugikan BPR selama periode 2022.
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	0,50	0,64	0,10	1,24	0.124	BPR menerapkan fungsi kepatuhan di seluruh jenjang organisasinya sesuai pedoman dan aturan yang berlaku dan memonitor operasional BPR sesuai dengan aturan yang berlaku termasuk dalam hal ketepatan dalam penyampaian laporan ke OJK dan otoritas lainnya.
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	0,50	0,50	0,13	1,13	0.113	Penerapan fungsi audit intern dilaksanakan secara menyeluruh di semua jenjang organisasi BPR.
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	0,50	0,40	0,10	1,00	0.025	Periode 2022 BPR menunjuk KAP Jullie Sondakh & Grace Nangoy untuk melakukan pemeriksaan kemudian melaporkan hasil laporan audit independent tersebut ke Otoritas Jasa Keuangan.
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	0,50	0,40	0,10	1,00	0.100	BPR menerapkan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern di seluruh jenjang organisasi.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	0,50	0,80	0,20	1,50	0.113	Periode 2022 terdapat kelebihan penyaluran kredit kepada Pihak Terkait yang melebihi 10% dari modal inti BPR, namun penyaluran kredit tersebut diikat dengan jaminan likuid berupa dana pada tabungan dan bilyet giro pada bank lain. Kelebihan penyaluran kredit kepada Pihak Terkait telah diselesaikan.
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	0,50	0,40	0,10	1,00	0.075	Rencana Bisnis BPR disusun dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi misi BPR yang juga mempertimbangkan pencapaian periode-periode sebelumnya, kondisi perekonomian, peer group dan azas perbankan yang sehat serta prinsip kehati-hatian.
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	0,50	0,40	0,10	1,00	0.075	BPR selalu berupaya memelihara sistem informasi manajemen dan kualitas SDM yang kompeten sehingga dapat menyajikan laporan keuangan dan non keuangan yang transparan, lengkap, akurat, kini dan utuh.
Nilai Komposit						1.1	
Peringkat Komposit						Sangat Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	BPR merupakan BPR dengan modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,- dengan komposisi Direktur Utama dan Direktur Operasional yang juga membawahi fungsi Kepatuhan
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota yang berbeda namun masih dalam provinsi yang sama dengan kantor pusat BPR.
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan lain pada Bank dan/ atau Perusahaan Non Bank lain serta tidak terlibat dalam organisasi politik.
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Dewan Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda dengan sesama anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris lainnya.
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	1	Direksi tidak menggunakan jasa profesional khusus sebagai konsultan.
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan diangkat sesuai hasil RUPS Tanggal 13 Februari 2020.
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	1,17	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,59	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1	Direksi melaksanakan setiap tugas dan tanggung-jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain.
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	1	Direksi menindaklanjuti setiap temuan audit dan rekomendasinya baik temuan dari audit internal, OJK dan auditor ekstern dan memonitor realisasi komitmen atas hasil tindak lanjut temuan-temuan tersebut.
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	1	Dengan adanya Core Banking System yang memadai, sehingga dapat membantu Direksi dalam menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu bagi Dewan Komisaris
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Setiap keputusan yang ditetapkan dalam rapat pengurus dilakukan secara musyawarah mufakat dengan berlandaskan pada visi misi perusahaan dan sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku.
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Direksi tidak mengambil keuntungan baik secara pribadi, keluarga dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan BPR dan hanya menerima yang menjadi hak-haknya sesuai remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan dalam RUPS Tahun 2022.
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	1	Direksi berperan aktif dalam pengarahan keikutsertaan pegawai dalam webinar, pelatihan atau sosialisasi yang dilaksanakan OJK maupun lembaga atau instansi lain yang dapat menunjang peningkatan pengetahuan dan update terkini tentang perbankan dan hal lainnya yang dinilai mampu mendorong kualitas kinerja pegawai.
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	1	Anggota Direksi mengimplementasikan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya,
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	1	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai pedoman dan tata tertib kerja Direksi ditetapkan dalam Surat Keputusan Komisaris BPR No. 006/SK-KOM/ABK/9.2020
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Direksi disampaikan melalui RUPS dengan lampiran data dan informasi yang akurat dan riil.
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	1	Direksi selalu mengkomunikasikan setiap kebijakan baru kepada seluruh pegawai BPR dan melakukan refreshment terhadap kebijakan-kebijakan yang berlaku di BPR.
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	1	Setiap hasil rapat dibuatkan notulen atau risalah rapatnya dan di dokumentasikan dengan baik sesuai urutan tanggal pelaksanaannya.
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	1	Anggota Direksi dan seluruh pegawai BPR aktif mengikuti sosialisasi, webinar dan pelatihan yang dilaksanakan Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga lainnya yang mampu meningkatkan pengetahuan dan kemampuan serta update terkini mengenai pengelolaan BPR sehingga periode 2022 BPR mampu memperoleh pencapaian sesuai ekspektasi internal stakeholders, dimana terdapat peningkatan aset BPR yang sebelumnya dibawah 100 miliar rupiah menjadi aset diatas 100 miliar rupiah.
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	Direksi melaporkan laporan penerapan tata kelola kepada Otoritas Jasa Keuangan, Perbarindo dan majalah media BPR secara tepat waktu sesuai ketentuan yang ada.
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Periode 2022 komposisi Dewan Komisaris BPR 2 orang, modal inti BPR kurang dari Rp. 50,000,000,000,00
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi, yakni dengan komposisi 2 orang Dewan Komisaris dan 2 orang anggota Direksi
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah dinyatakan lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS.
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di kabupaten yang sama dengan lokasi Kantor Pusat BPR, sedangkan 1 (satu) anggota lainnya di kota/kabupaten yang berbeda namun dalam provinsi yang sama dengan lokasi kantor BPR.
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Periode 2022 modal inti BPR masih dalam posisi kurang dari Rp. 50.000.000.000,00 BPR tidak memiliki anggota Komisaris Independen.
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	1	Pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris diatur dalam Surat Keputusan Komisaris No. 005/SK-Kom/ABK/9.2020
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	Dewan Komisaris tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris maupun Direksi atau Pejabat Eksekutif di BPR, BPRS atau Bank Umum lainnya.
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya juga dengan Direksi

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	2	Periode 2022 BPR tidak memiliki anggota Komisaris Independen
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	1,22	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,61	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	1	Dalam melaksanakan tugas pengawasannya, periode 2022 Dewan Komisaris dan Direksi melaksanakan rapat secara berkala dimana diinformasikan evaluasi hasil pencapaian dan target BPR. Dalam rapat tersebut Dewan Komisaris memberikan nasihat/rekomendasi sesuai prinsip kehati-hatian dan risalah rapatnya didokumentasikan dengan baik.
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	1	Dewan Komisaris melakukan pemantauan dan pengarahannya terhadap pelaksanaan kebijakan strategis BPR dengan mengevaluasi pencapaian BPR setiap bulannya.
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	1	Pengambilan keputusan terkait kegiatan operasional BPR ditetapkan sesuai aturan yang berlaku dan Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR.
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	1	Setiap hasil pemeriksaan/temuan audit intern, audit ekstern (KAP) dan OJK diinformasikan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut/realisasi komitmen auditee.
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal, nampak dengan terselenggaranya rapat Dewan Komisaris yang dilaksanakan secara berkala, paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan.

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Setiap pengambilan keputusan dilaksanakan secara musyawarah mufakat sesuai ketentuan yang berlaku.
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil keuntungan baik untuk kepentingan pribadi, keluarga dan atau pihak lain dan hanya menerima yang menjadi hak-haknya sesuai remunerasi dan fasilitas lainnya sesuai ketetapan dalam RUPS.
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	1	Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan menaruh perhatian terhadap hal-hal yang memerlukan tindak lanjut Direksi.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Risalah rapat Dewan Komisaris didokumentasikan dengan baik dan jelas, diurutkan sesuai tanggal pelaksanaannya.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	Periode 2022 modal inti BPR masih kurang dari Rp. 80.000.000.000,- dengan begitu BPR belum membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, fungsi Audit Intern dan Pemantau Risiko dibawah oleh Pejabat Eksekutif
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Periode 2022 BPR belum memiliki Komite Audit. Penerapan fungsi audit intern dan evaluasinya dilakukan oleh Pejabat Eksekutif.
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Periode 2022 BPR belum memiliki Komite Pemantau Risiko. Penerapan fungsi pemantauan risiko dan evaluasinya dilakukan oleh Pejabat Eksekutif.
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Periode 2022 BPR belum memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, kedua fungsi tersebut dilaksanakan oleh Pejabat Eksekutif yang menjalankan tugasnya sesuai pedoman dan tata tertib kerja dimana dilakukan penyampaian hasil evaluasi kepada Dewan Komisaris yang aktif melakukan pengawasan.
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	Periode 2022 BPR belum memiliki Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit Intern. Penerapan fungsi pemantauan risiko, audit intern dan hasil pemeriksaan/ evaluasinya dilakukan oleh Pejabat Eksekutif yang memberikan setiap hasil pemeriksaan/evaluasi tersebut dan rekomendasinya kepada Dewan Komisaris untuk ditindak lanjuti Direksi.
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	1	Kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian terkait benturan kepentingan BPR di atur dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 013/SK-DIR/ABK/3.2020
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	1	Tidak ditemukan tindakan/ aktivitas dan atau transaksi-transaksi yang menyangkut benturan kepentingan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR selama periode 2022.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	1	Tidak ada kegiatan dan atau transaksi terkait benturan kepentingan yang dilakukan seluruh internal BPR yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR selama periode 2022.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	1	Anggota Direksi BPR yang juga membawahi fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana kepada pihak ketiga.
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	1	Anggota Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan memahami dan menjalankan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan perbankan.
3	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	1	Periode 2022 BPR menunjuk dan mengangkat Pejabat Eksekutif yang membawahi fungsi kepatuhan BPR
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	1	Periode 2022 dilakukan pengkinian Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko sesuai SK Nomor 058/SK-DIR/ABK/6.2022
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	1	Pejabat Eksekutif BPR yang menangani fungsi kepatuhan menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan intern, pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan telah ditetapkan BPR dalam SK Direksi No. 007/SK-DIR/ABK/3.2020 Tanggal 24 Maret 2020.
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	1	Penyampaian laporan-laporan kepada OJK maupun lembaga lainnya sesuai aturan yang berlaku dan tidak melewati batas waktu penyampaian laporan.
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	1	Guna mendorong peningkatan kualitas SDM sesuai satuan kerjanya, selama periode 2022 Anggota Direksi yang membawahi Fungsi Kepatuhan aktif melakukan sosialisasi ketentuan terkini juga refreshment tentang ketentuan-ketentuan baik ketentuan internal BPR maupun ketentuan Otoritas Jasa keuangan dan peraturan perundang-undangan juga aktif mendorong keikutsertaan dalam sosialisasi, webinar dan atau pelatihan yang dilaksanakan Otoritas Jasa Keuangan dan atau lembaga lainnya.
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi Operasional yang membawahi fungsi kepatuhan melakukan pemantauan dan kontrol terhadap operasional BPR termasuk terhadap komitmen BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan.
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melaksanakan tugasnya dengan memeriksa kebijakan, prosedur dan kegiatan usaha BPR berjalan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu terhadap kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur BPR dan dilakukan pengkinian terhadap kebijakan dan prosedur mengenai kebijakan manajemen risiko agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	1,60	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,64	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	1	Periode 2022 pelanggaran terhadap BMPK terhadap pihak terkait BPR telah selesaikan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	1	Anggota Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung-jawabnya kepada Direktur Utama, dan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan secara berkala setiap awal tahun.
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Tidak terdapat penyimpangan dalam setiap keputusan dan kebijakan yang di putuskan Direksi BPR namun dalam hal terjadi penyimpangan akan segera melaporkan hal tersebut kepada OJK.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	Modal inti BPR kurang dari Rp 50,000,000,000,- dan periode 2022 BPR telah merekrut dan mengangkat Pejabat Eksekutif yang membawahi fungsi audit internal.
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	1	Periode 2022 dilakukan revisi versi 2 terhadap Kebijakan dan Prosedur Audit Internal BPR yang telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	1	Pejabat Eksekutif audit intern melakukan tugas dan tanggung-jawab pengawasan dan pengendalian terhadap satuan kerja operasional secara independen dengan berpedoman pada ketentuan internal BPR dan ketentuan OJK serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	1	Pelaksanaan tugas dan tanggung-jawab audit intern BPR dilaporkan secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	1	BPR telah melakukan program rekrutmen sumber daya manusia yang efektif membawahi fungsi audit intern pada Januari 2022 dan mengikuti pelatihan yang mendukung pengembangan mutu audit internal pada 10 Maret 2022.
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	1	Kebijakan dan prosedur audit internal BPR versi 2 sesuai SK Direksi No. 057/SK-DIR/ABK/6.2022 diterapkan dalam pelaksanaan fungsi audit intern BPR.
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR menunjuk pihak ekstern dalam hal ini Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK untuk melakukan kaji ulang atau pemeriksaan laporan keuangan BPR setiap tahun.
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	1	Pelaksanaan tugas dan tanggung-jawab audit intern BPR dilaksanakan secara memadai mulai dari persiapan audit, penyusunan program audit, pemeriksaan audit, laporan hasil audit dan monitoring tindak lanjut hasil audit yang dilaporkan secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan juga kepada Otoritas Jasa Keuangan.
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	1	Guna menunjang penerapan fungsi audit, dilakukan refreshment terkait ketentuan dan prosedur internal, ketentuan OJK dan perundang-undangan juga ikut serta dalam pelatihan yang menunjang peningkatan mutu dan keterampilan SDM BPR.
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,25	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,50	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Pejabat Eksekutif audit intern BPR telah menyampaikan laporan hasil pemeriksaan audit dan monitoring tindak lanjut hasil audit kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit periode 2022 kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)</p>	2	Setelah dilaksanakan kaji ulang/pemeriksaan dari Kantor Akuntan Publik, BPR melaporkan hasil kaji ulang/pemeriksaan KAP tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.
13	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	1	Dalam hal dilakukannya pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Eksekutif, BPR melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,25	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,13	

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	1	Dalam menugaskan pemeriksaan kepada Kantor Akuntan Publik, BPR terlebih dahulu memperhitungkan dan kemudian memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit dan aspek lainnya sesuai aturan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1	Dalam RUPS BPR diusulkan dan kemudian disetujui Kantor Akuntan Publik yang kompeten dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pemeriksaan laporan tahunan BPR.
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	Penyampaian hasil audit KAP dan Management Letter dilaporkan langsung oleh Kantor Akuntan Publik kepada Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	1	Hasil audit dan management letter oleh KAP disampaikan kepada BPR tepat waktu sesuai tanggal perjanjian kerjasama yang telah disepakati antara KAP dan BPR.
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Hasil audit telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	1	BPR memiliki modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,- dan pada periode 2022 BPR telah merekrut dan mengangkat satu orang Pejabat Eksekutif yang membawahi fungsi Manajemen Risiko.
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	1	Kebijakan, Prosedur dan Penetapan limit Manajemen Risiko diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. 058/SK-DIR/ABK/6.2022.
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	1	Kebijakan dan prosedur pengelolaan risiko BPR diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. 058/SK-DIR/ABK/6.2022.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	<p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p>	1	Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis dalam Surat Keputusan Direksi No. 008/SK-DIR/ABK/3.2020 yang kemudian di revisi versi 2 sesuai Surat Keputusan Direksi No. 058/SK-DIR/ABK/6.2022.

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	1	Dewan Komisaris setuju dengan kebijakan Manajemen Risiko yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 008/SK-DIR/ABK/3.2020 dan mengevaluasinya. Dalam hal transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap transaksi tersebut.
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	1	BPR melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko sesuai prosedur dalam SK Direksi No. 058/SK-DIR/ABK/6.2022.
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	1	Sistem pengendalian intern di BPR diterapkan secara menyeluruh.
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Penerapan manajemen risiko BPR dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi dengan menerapkan seluruh risiko yakni risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko likuiditas, risiko reputasi dan strategik.
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	1	Core Banking System yang memadai membantu BPR memperoleh informasi yang lengkap, akurat, kini dan utuh.
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	1	Direksi aktif mendorong dan mewajibkan seluruh jenjang organisasi untuk mengikuti pelatihan dan atau sosialisasi yang dilaksanakan oleh OJK dan atau otoritas lainnya sesuai dengan satuan kerja masing-masing yang dapat meningkatkan kompetensi SDM sesuai bidangnya masing-masing.
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko melalui sistem pelaporan APOLO sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Periode 2022 BPR mengembangkan produk baru yakni layanan Virtual Account dan telah melaporkan produk dan profil risikonya kepada Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	1	BPR telah memiliki Kebijakan dan prosedur yang memadai terkait BMPK yang di tetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 046/SK-DIR/ABK/05.2021.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	BPR secara berkala mengevaluasi sistem dan prosedur BMPK sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	Proses pemberian kredit BPR kepada pihak terkait dan pihak tidak terkait dijalankan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 49/POJK.02/2017.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR setiap bulannya menyampaikan laporan terkait BMPK secara benar dan tepat waktu bersamaan dengan Laporan Bulanan.

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Periode 2022 terdapat kelebihan penyaluran kredit kepada Pihak Terkait yang melebihi 10 persen dari modal inti BPR, namun penyaluran kredit tersebut diikat dengan jaminan likuid berupa dana pada tabungan dan bilyet giro pada bank lain. Kelebihan penyaluran kredit kepada Pihak Terkait telah diselesaikan.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	Direksi BPR telah menyusun rencana bisnis BPR yang disesuaikan dengan visi dan misi BPR dan memaparkannya kepada Dewan Komisaris yang selanjutnya memberi persetujuan mengenai rencana bisnis tersebut.
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR menggambarkan rencana Bisnis yang mencakup Rencana Jangka Pendek, Rencana Jangka Menengah, dan/atau Rencana Strategis Jangka Panjang, sebagaimana diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 52/SEOJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat (RBB).
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	1	Pemegang saham BPR mendukung sepenuhnya rencana bisnis BPR salah satunya dengan penyediaan dana yang cukup besar dari Pemegang Saham berupa dana murah tabungan
Total nilai skala penerapan		3	
Rata-rata		1,00	
Bobot		0,50	
Nilai struktur		0,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	1	BPR menyusun rencana bisnis dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal, azas perbankan yang sehat, prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko agar pertumbuhan BPR dapat terarah sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	1	Dewan Komisaris berperan aktif dalam pengawasan terhadap rencana bisnis yang telah disusun dengan diadakannya rapat bulanan tentang evaluasi pencapaian BPR sesuai dengan rencana bisnis BPR.
Total nilai skala penerapan		2	
Rata-rata		1,00	
Bobot		0,40	

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Rencana bisnis BPR periode 2023 telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada Desember 2022 dan dalam hal terjadi perubahan akan disampaikan kembali ke OJK sesuai ketentuan yang berlaku yakni melalui sistem pelaporan APOLO.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	1	BPR selalu berupaya memelihara sistem informasi manajemen dan kualitas SDM yang kompeten sehingga dapat menghasilkan laporan-laporan yang lengkap, akurat, kini dan utuh.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan keuangan publikasi BPR disusun sesuai ketentuan OJK.
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan keuangan tahunan BPR disusun sesuai ketentuan OJK.
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Dalam operasinya, BPR selalu berpedoman pada ketentuan OJK, salah satunya dengan menerapkan prinsip Perbankan yang sehat melalui Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Idependensi, dan Kewajaran.
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR selalu menyusun dan menyajikan laporan keuangan maupun non keuangan berdasarkan tata cara, jenis dan cakupan sesuai ketentuan OJK.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan tahunan dan laporan publikasi BPR ditanda-tangani oleh 2 anggota Direksi BPR dengan mencantumkan nama lengkap Direksi kemudian melaporkannya ke OJK dan publikasi pada papan pengumuman di banking hall BPR sesuai ketentuan yang ada.
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	1	Pada periode 2022 tidak ada laporan pengaduan nasabah sehingga BPR tidak melakukan tindak lanjut dan penyelesaian, meski demikian laporan terkait pengaduan nasabah tetap dilaporkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yakni setiap triwulan melalui sistem pelaporan SIPEDULI.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama BPR : PT. BPR Arya Bira Karsa
Alamat : Jalan Raya Manado – Bitung, Kolongan Tetempangan
Kota/Kabupaten : Minahasa Utara

Dengan ini Laporan Tata Kelola Tahun 2022 PT. BPR Arya Bira Karsa telah dibuat dan selanjutnya akan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR dan Media atau Majalah Ekonomi.

Minahasa Utara, 12 Januari 2023

Yang membuat,



THEREZA MICHIKO LABESI
Audit Internal, Manajemen Risiko dan Kepatuhan

Persetujuan



ASWIN SONY WEMY KOTAMBUNAN
Direktur Utama



BILLY DONALD KUMOLONTANG
Komisaris Utama

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Nama BPR : PT BPR ARYA BIRA KARSA
Alamat : Jalan Raya Manado Bitung, Kolongan Tetempangan
Kec. Kalawat Minahasa Utara
No Telp : 0431-7008567
Posisi Laporan : 31 Desember 2022
Modal Inti : Rp. 6.204.133.875,-
Total Aset : Rp. 149.236.643.257,-
Status Audit : Ya
Bobot BPR : B
Nilai Komposit : 1,1
Peringkat Komposit : Sangat Baik

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis Self Assessment Tata Kelola, predikat komposit PT. BPR Arya Birsra Karsa secara umum adalah sangat baik. Hal ini ditunjukkan dalam pemenuhan yang baik atas 11 (sebelas) faktor penilaian dalam penerapan Tata Kelola, diantaranya : Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta proses penerapan tata kelola, Dewan Komisaris dan Direksi PT. BPR Arya Bira Karsa telah memenuhi ketentuan mengenai komposisi, jumlah integritas, domisili, kompetensi, independensi dan ketentuan rangkap jabatan. Pemenuhan terhadap struktur organisasi dengan dilakukannya pengangkatan Pejabat Eksekutif Operasional, Audit Intern, Manajemen Risiko dan Kepatuhan pada bulan Mei 2022 dan sudah dilaporkan ke OJK. Pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris dilakukan secara aktif dengan diadakannya rapat rutin setiap bulannya dengan mengevaluasi perkembangan BPR. Direksi pun telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS, memonitoring realisasi komitmen tindak lanjut temuan audit intern, KAP dan OJK. Penerapan Tata Kelola yang baik di BPR Arya Bira Karsa semakin tercermin dengan tidak adanya penyimpangan (fraud), transaksi yang mengandung unsur benturan kepentingan, tidak ada pengaduan/komplain nasabah serta kepatuhan dalam penyampaian laporan keuangan dan non keuangan juga laporan pengaduan nasabah dilaporkan secara tepat waktu. Meski terdapat kelemahan dalam penyaluran kredit kepada Pihak Terkait yang melebihi 10% dari modal BPR, namun pengikatan kredit tersebut diikat dengan jaminan likuid berupa tabungan dan bilyet giro yang mudah dicairkan, sehingga mengurangi risiko gagal bayar. Pemenuhan posisi PE Bisnis dalam struktur organisasi BPR pun sudah ada dalam rencana bisnis BPR periode 2023. Kedepannya PT. BPR Arya Bira Karsa akan terus melakukan perbaikan terhadap beberapa kelemahan-kelemahan yang ada untuk penyempurnaan pelaksanaan Tata Kelola yang baik.

Minahasa Utara, 12 Januari 2023



ASWIN SONY WEMY KOTAMBUNAN
Direktur Utama

Persetujuan



BILLY DONALD KUMOLONTANG
Komisaris Utama

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT BPR Arya Bira Karsa

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

506043-1-TKBPRKA-R-A-20221231-010201-601919-30012023150545

Periode Data

2022

User ID Petugas Pelaporan

bpr.aryabirakarsa@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2023-01-30 15:05:45



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.